

## Laporan Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode Desember 2019

### 1. Periode Pengelolaan Informasi dan Masalah

Periode Penyampaian Informasi dan Masalah dalam laporan ini yaitu meliputi permintaan informasi dan penyampaian masalah yang masuk dalam rentang bulan Desember 2019.

### 2. Jumlah Permintaan Informasi dan Penyampaian Masalah/Aduan

Jumlah Permintaan Informasi dan Masalah yang masuk dalam rentang bulan Desember 2019 yaitu sebanyak 4 item yang berasal dari Sigi. Adapun Daftar Permintaan Informasi dan Masalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Daftar Permintaan Informasi dan Masalah

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan
1	SIGI	24/12/2019	Bagaimana dengan nama yang sudah terdata di Yayasan Bumi Tangguh sebagai penerima huntap? Apakah tetap menerima huntap dari PUPR atau tidak?
2	SIGI	24/12/2019	Yang berhak menerima huntap diberikan gambaran yang jelas tentang bentuk rumah dan bahan, sehingga masyarakat tahu apa yang akan diterima
3	SIGI	24/12/2019	Apakah pemerintah akan menyediakan fasilitas air bersih dan listrik di huntap?
4	SIGI	24/12/2019	Saya berharap dan meminta khususnya dusun 2 Desa Bangga agar dibangun huntap terlebih dahulu karena lahan yang ada di dusun 2 sudah 100% siap.

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

### 3. Media Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah

Penyampaian Permintaan Informasi dan Masalah sebagian besar dilakukan melalui tatap muka langsung dalam melakukan survei dalam rangka penyusunan LARAP, dan sebagian besar laporan berasal dari masyarakat dan aparat setempat.

### 4. Penyelesaian Permintaan Informasi dan Masalah

#### a. Permintaan Informasi dan Masalah terselesaikan

Dari 4 PIM yang telah dikompilasikan terdapat PIM yang sudah diselesaikan atau dapat diselesaikan langsung oleh fasilitator di lapangan. PIM yang dapat diselesaikan di lapangan yaitu 4 PIM atau sebesar 100%. Sebagian besar permintaan informasi dan masalah terkait dengan hunian tetap. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Permintaan Informasi dan Masalah terselesaikan**

No	Nama Kota/Kabupaten	Tanggal Pengaduan	Isi Pengaduan	Tema Aduan	Unit Organisasi/Unor/OPD	Unit Terkait	Lokasi Kejadian	Tanggal	Uraian Hasil Akhir
1	SIGI	24/12/2019	Bagaimana dengan nama yang sudah terdata di Yayasan Bumi Tangguh sebagai penerima huntap? Apakah tetap menerima huntap dari PUPR atau tidak?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	1 Bangga	24/12/2019	Warga hanya akan menerima 1 unit huntau, jika telah terdaftar di WTB dan akan menerima dari NGO tersebut maka warga tidak akan menerima lagi huntau dari PUPR
2	SIGI	24/12/2019	Yang berhak menerima huntau diberikan gambaran yang jelas tentang bentuk rumah dan bahan, sehingga masyarakat tahu apa yang akan diterima	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	1 Bangga	24/12/2019	Pemda telah menyampaikan melalui fasilitator bahwa desain rumah adalah tipe 36 dan ada beberapa versi rumah yaitu RISHA, RIKO, dan RIKA. Untuk detail informasi ini masih menunggu informasi resmi dari PUPR
3	SIGI	24/12/2019	Apakah pemerintah akan menyediakan fasilitas air bersih dan listrik di huntau?	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	1 Bangga	24/12/2019	Ya. Pemerintah akan menyiapkan fasilitas air bersih dan listrik di lokasi huntau kawasan dan satelit.
4	SIGI	24/12/2019	Saya berharap dan meminta khususnya dusun 2 Desa Bangga agar dibangun huntau terlebih dahulu karena lahan yang ada di dusun 2 sudah 100% siap.	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Hunian tetap/huntau (rumah, jalan, & drainase permukiman)	Safeguard	1 Bangga	24/12/2019	Aspirasi diterima dan akan diteruskan ke PUPR sambil proses dokumen LARAP dilengkapi. Keputusan pembangunan masih akan ditindaklanjuti dengan melakukan kesiapan

Sumber: SIM Manual PIM, 2019

Dari berbagai permintaan informasi dan pengaduan masalah yang masuk terdapat beberapa yang dominan ditanyakan antara lain:

1. Status kepemilikan tanah warga yang berada di Zona Merah;
2. Status kepemilikan hunian yang diberikan pemerintah;
3. Informasi tentang hunian yang kurang jelas (terkait jumlah rumah, infrastruktur, dan lain sebagainya).